

BAHASA TRANSLATION

Kekerasan Seksual Terkait Konflik di Indo-Pasifik: Pernyataan Aksi Konferensi 2025

Sudah 25 tahun sejak Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace, and Security/WPS*) yang menyerukan tanggung jawab negara untuk mengakhiri kekerasan seksual; dan 13 tahun sejak diadopsinya Resolusi 1820, yang mengancam pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai senjata yang merupakan bagian dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida.

Lebih dari 200 delegasi menghadiri Konferensi "*Justice Denied: Fighting Widespread Impunity for Conflict-Related Sexual Violence (CRSV)*" pada 2–3 Juni 2025. Ini merupakan konferensi internasional pertama yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas persistensi kekerasan seksual terkait konflik (CRSV) di kawasan Indo-Pasifik. Konferensi ini menghubungkan dialog global mengenai pencegahan CRSV dan respons yang berpusat pada penyintas dengan kondisi terkini mengenai pelayanan perawatan dan keadilan yang berpusat pada penyintas CRSV di kawasan Indo-Pasifik.

Penyintas, peneliti, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, dan beberapa negara terlibat dalam pembahasan situasi di Indo-Pasifik di mana [CRSV](#) masih berlangsung.

Penyintas (dan korban) kekerasan seksual sistematis dan CRSV adalah orang dewasa, anak-anak, dan semua jenis kelamin.

Saat ini, CRSV terus meningkat meskipun sudah ada komitmen internasional untuk mengatasinya. Impunitas terhadap kekerasan ini sudah terlalu tinggi di lingkungan yang rentan dan dilanda konflik. Namun, dukungan yang aman dan mudah diakses bagi para penyintas justru semakin berkurang, bukan diperluas.

Kawasan Indo-Pasifik merupakan titik pusat bagi pembelajaran, aktivisme, dan pengalaman hidup terkait CRSV.

Peserta konferensi telah mengidentifikasi aksi-aksi prioritas yang mencerminkan komitmen mereka untuk menjamin hak, pelayanan, martabat, keadilan, dan agensi yang berpusat pada penyintas di seluruh kawasan Indo-Pasifik.

Konsensus Konferensi:

Kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan yang sistematis, represif, terstruktur dan politis, yang berakar pada diskriminasi dan ketidaksetaraan gender.

Trauma akibat CRSV pada masa kolonial beserta dampak turunannya yang merugikan masih terus berlanjut hingga saat ini.

Semua respons terhadap kekerasan ini harus berpusat pada penyintas dan berlandaskan pemahaman terhadap trauma. Ini artinya, setiap program harus mengutamakan kebutuhan, keselamatan, dan prioritas para penyintas dibandingkan dengan kriteria pembuktian, efisiensi, dan target kinerja.

Respons yang berpusat pada penyintas membutuhkan dukungan dari para penggerak di semua sektor yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan CRSV: termasuk, misalnya, sektor kesehatan, pendidikan, kepolisian, hukum, forensik, media, teknologi digital, dan militer/keamanan.

Berikan ruang atau kesempatan bagi para penyintas untuk membagikan kisah mereka, pastikan kita mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menjaga kesaksian mereka secara utuh. Mengangkat suara dan pengalaman para penyintas sangat penting untuk memperjuangkan keadilan dan pencegahan, baik melalui kesaksian yang direkam, publikasi, karya seni, musik, tari, film, maupun praktik kreatif dan/atau penyembuhan lainnya.

Seruan untuk Investasi oleh negara, organisasi multilateral, dan donor:

Untuk mencegah CRSV:

Mengakui dan mendukung program-program yang menangani norma sosial, melalui kemitraan dengan organisasi hak asasi manusia lokal, untuk mengurangi dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong praktik yang inklusif gender.

Berkomitmen terhadap Rencana Aksi Nasional dan Regional Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) untuk mengidentifikasi mekanisme dan garis tanggung jawab yang jelas dalam pemantauan dan pelaporan CRSV.

Untuk mendukung pemulihan penyintas:



CEVAW

Memprioritaskan reparasi transformatif, termasuk yang bersifat mendesak dan sementara, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan elemen yang penting bagi pemulihan individu maupun komunitas; pelaksanaan reparasi ini tidak memerlukan proses hukum pidana.

Berinvestasi dalam program-program merawat ingatan untuk memperjuangkan keadilan (*commemorative justice*) dan pemulihan komunitas yang dipimpin oleh penyintas dengan menitikberatkan pada partisipasi lintas generasi.

Memastikan bahwa proses keadilan transisional memiliki kerangka waktu jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan dukungan dan layanan yang berkelanjutan bagi penyintas dan komunitas.

Untuk merespons CRSV:

Memprioritaskan penyediaan dan distribusi layanan perawatan yang berpusat pada penyintas, berlandaskan pemahaman terhadap trauma, aman, mudah diakses, dan inklusif.

Menerapkan proses dokumentasi dan investigasi yang berpusat pada penyintas dan berlandaskan pemahaman terhadap trauma.

Berinvestasi dalam mendukung penelitian dan program untuk mengeksplorasi praktik dokumentasi dan investigasi baru yang tidak membahayakan, menstigmatisasi, atau mengharuskan penyintas untuk menghidupkan kembali pengalaman mereka secara berulang kali.

Mendukung ekosistem dokumentasi dan investigasi di tingkat negara, dengan dukungan regional dan internasional untuk membangun kasus yurisdiksi universal.

Memastikan penyintas ikut serta dalam menciptakan atau memimpin dokumentasi dan investigasi yang aman dan etis, misalnya dengan menggunakan [Kode Murad](#) (*Murad Code*).

Mengecam perjanjian damai dan/atau aktor negara yang memberikan amnesti CRSV kepada kombatan.



Langkah Selanjutnya untuk CEVAW :

1. Membangun Jaringan Kolaboratif Indo-Pasifik mengenai CRSV yang terbuka bagi semua pihak untuk menjembatani kesenjangan dan berbagi pengetahuan lintas bidang penelitian, praktik, dan kebijakan secara virtual.
2. Menyelenggarakan konferensi dua tahunan mengenai CRSV di kawasan Indo-Pasifik dengan memastikan konferensi tersebut mencakup seluruh aspek advokasi, penelitian, praktik, dan kebijakan mengenai CRSV.
3. Menciptakan peluang untuk penelitian dan publikasi bersama para penyintas dan kelompok advokasi penyintas.